Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Dari Relasi Dagang ke Intervensi Kolonial: Hubungan VOC dan Kesultanan Kutai, Abad XVII–XVIII

Iffah Nur Azizah
UIN Sunan Ampel Surabaya
03030223108@uinsa.ac.id
Imam Ibnu Hajar
UIN Sunan Ampel Surabaya
Ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas hubungan antara *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan Kesultanan Kutai Kartanegara pada abad XVII–XVIII, dengan fokus pada upaya VOC membangun monopoli perdagangan serta batas pengaruhnya terhadap otoritas kesultanan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan mencakup kajian mengenai perdagangan regional Kalimantan, perjanjian perdagangan, serta literatur tentang hubungan politik dan ekonomi di kawasan Kalimantan timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kedatangan VOC, Kutai telah terhubung dengan jaringan perdagangan regional yang melibatkan pedagang dari berbagai wilayah, termasuk Jawa dan Makassar. Pada 1634 M, VOC mengirimkan misi dagang ke Kutai dan Paser, kemudian mengadakan perjanjian dengan penguasa Kutai pada 8 November 1635 untuk membatasi perdagangan pesaing dan memperoleh akses dagang yang lebih istimewa. Namun, tindak lanjut perjanjian tersebut tidak diketahui secara jelas, sementara misi dagang *Paulus de Beck* pada 1671 tidak berhasil membangun hubungan perdagangan sebagaimana diharapkan. Upaya VOC menjangkau Kutai pada abad XVIII, termasuk misi yang disebut berlangsung pada 1747, menunjukkan berlanjutnya kepentingan perusahaan terhadap kawasan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan VOC dan Kesultanan Kutai ditandai oleh persaingan ekonomi dan negosiasi politik, tetapi bukti yang tersedia belum menunjukkan keberhasilan VOC dalam menguasai pemerintahan Kutai secara langsung.

Kata Kunci: *Kesultanan Kutai Kartanegara, monopoli perdagangan, VOC*

PENDAHULUAN

Hubungan antara *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan Kesultanan Kutai pada abad XVII–XVIII memperlihatkan pertemuan kepentingan perdagangan dengan upaya memperluas pengaruh politik di Kalimantan bagian timur. Pada abad XVII, Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan sejumlah wilayah, termasuk Gowa dan Jawa, melalui jaringan pelayaran di Selat Makassar. Keadaan ini menarik perhatian VOC yang berusaha menguasai perdagangan dan membatasi persaingan dengan pedagang lain. Pada tahun1634 M, VOC mengirim tiga kapal dagang ke Kutai dan Pasir untuk menjalin

hubungan sekaligus mengajak kedua kerajaan mendukung monopoli perdagangan. Namun, usaha tersebut menghadapi hambatan karena Kutai telah memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. (Juniar Purba & Yusri Darmadi, 2022)

Upaya VOC berlanjut pada 1635 melalui kedatangan Gerrit Thomassen Pool. Dalam perundingan dengan Sultan Sinum Panji Mendapa Ing Martapura, VOC mengaitkan persoalan perdagangan dengan kewajiban Kutai membayar upeti kepada Banjarmasin. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan VOC tidak hanya berkaitan dengan pembelian barang dagangan, tetapi juga menyentuh hubungan politik antarkerajaan.(Juniar Purba & Yusri Darmadi, 2022) Pada 1671, VOC kembali mengirim Paulus de Beck dengan kapal *Chialoup de Noorman* untuk menjalin hubungan dagang dengan Kutai dan Berau. Misi tersebut tidak berhasil membangun hubungan perdagangan yang diharapkan. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa VOC belum mampu memperoleh kedudukan dagang yang kuat di Kutai pada abad XVII.(Haidi, 1991)

Pada abad XVIII, VOC masih berusaha menjajaki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Kalimantan timur. Misi yang dipimpin Van der Heyden pada 1747 merupakan salah satu upaya untuk menilai peluang perdagangan di Kutai dan Pasir.(Haidi, 1991) Akan tetapi, hubungan dagang yang menguntungkan VOC belum berhasil dibangun. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perluasan pengaruh VOC di Nusantara tidak selalu berlangsung melalui penguasaan langsung, melainkan juga melalui perundingan, tuntutan monopoli, dan pemanfaatan hubungan antarkerajaan. Dalam kasus Kutai, upaya tersebut berhadapan dengan kepentingan penguasa setempat serta jaringan perdagangan regional yang telah terbentuk sebelumnya.

Kajian mengenai hubungan VOC dan Kutai telah dibahas dalam sejumlah karya. J. Eisenberger dalam *Kroniek der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo* (1936) mencatat misi perdagangan VOC ke Kutai pada tahun 1634 M, 1635 M, dan 1671 M.(J. Eisenberger, 1936) Buku *Sejarah Kota Samarinda* karya Moh. Nur Ars, Yunus Rasyid, dan Hasyim Achmad juga menguraikan hubungan VOC dengan Kutai dan Pasir serta kegagalan misi perdagangan tersebut.(Moh. Nur Ars dkk., 1986) Sementara itu, *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimantan Timur* menjelaskan upaya VOC memperluas monopoli perdagangan di wilayah tersebut.(Haidi, 1991) Karya-karya itu menjadi dasar penting untuk memahami hubungan awal VOC dengan Kutai, tetapi pembahasan mengenai perubahan strategi VOC dan cara Kesultanan Kutai

mempertahankan ruang geraknya dalam jaringan perdagangan regional masih perlu dirangkai secara khusus dalam satu kajian.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana hubungan VOC dan Kesultanan Kutai berubah dari upaya membangun relasi dagang menjadi usaha memperluas pengaruh politik pada abad XVII–XVIII. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan meliputi karya sejarah yang merujuk pada buku sejarah lokal serta dokumen kolonial yang dapat ditemukan melalui repositori digital. Kritik sumber dilakukan untuk membandingkan keterangan mengenai misi VOC dan menghindari penerimaan begitu saja terhadap penafsiran penulis terdahulu. Analisis menggunakan konsep kekuasaan dan perdagangan untuk memahami hubungan antara kepentingan ekonomi VOC, tuntutan politiknya, dan respons penguasa Kutai. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai keterbatasan upaya VOC memperluas pengaruhnya di Kalimantan timur sebelum terbentuknya penguasaan kolonial yang lebih langsung.

Dengan demikian, pembahasan difokuskan pada tiga persoalan yang saling berkaitan, yaitu misi perdagangan VOC ke Kutai pada tahun 1634 M, 1635 M, dan 1671 M; upaya VOC memperluas pengaruh melalui persoalan perdagangan dan hubungan antarkerajaan; serta keberlanjutan upaya tersebut pada abad XVIII, terutama melalui misi 1747. Melalui pembahasan ini, hubungan VOC dan Kesultanan Kutai ditempatkan bukan sekadar sebagai kisah kedatangan pedagang Eropa, melainkan sebagai bagian dari persaingan kepentingan ekonomi dan politik di jaringan perdagangan regional Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.(Sartono Kartodirdjo, 1992) Pada tahap heuristik, sumber dikumpulkan melalui buku sejarah, dokumen kolonial, dan catatan mengenai aktivitas VOC di Kalimantan timur pada abad XVII–XVIII. Sumber yang digunakan antara lain Sejarah Kota Samarinda karya Moh. Nur Ars, Yunus Rasyid, dan Hasyim Achmad, Kroniek der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo karya J. Eisenberger, serta arsip VOC yang dapat ditelusuri melalui portal digital Sejarah Nusantara milik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Tahap kritik sumber dilakukan untuk menilai autentisitas dan kredibilitas informasi, terutama mengenai misi VOC pada tahun 1634 M, perundingan 1635 M, misi 1671 M, dan ekspedisi 1747 M. Pada tahap interpretasi, fakta yang telah diverifikasi dianalisis menggunakan konsep kekuasaan dan perdagangan. Analisis ini bertujuan menjelaskan bagaimana kepentingan ekonomi VOC berkaitan dengan upaya memperoleh pengaruh politik, sekaligus mengkaji batas-batas keberhasilan upaya tersebut dalam menghadapi kepentingan penguasa Kutai dan jaringan perdagangan regional.

Tahap historiografi dilakukan dengan menyusun hasil penelitian secara kronologis dan analitis. Pembahasan tidak hanya menguraikan urutan kedatangan utusan VOC, tetapi juga menafsirkan tujuan setiap misi, bentuk hubungan yang diupayakan, dan hambatan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Misi Perdagangan VOC ke Kutai pada Tahun 1634 M, 1635 M, dan 1671 M

Hubungan antara *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan Kesultanan Kutai pada abad XVII perlu dipahami dari perkembangan perdagangan di kawasan Kalimantan bagian timur. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada 1602 untuk menjalankan perdagangan Asia atas nama para pemegang saham Belanda. Dalam perkembangannya, VOC tidak hanya membeli dan menjual barang, tetapi juga membangun benteng, mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat, mengerahkan pasukan, dan berusaha membatasi perdagangan pesaingnya. Karena itu, ketika VOC mendatangi Kutai, kepentingannya tidak terbatas pada kegiatan jual beli. VOC juga berusaha mendapatkan hak dagang khusus agar dapat mengendalikan perdagangan di wilayah yang dianggap menguntungkan.(Sem Touwe & Jems Sopacua, 2023)

Pada abad XVII, kawasan Selat Makassar merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara.(M. Nur Ichsan Azis, 2013) Kapal-kapal dagang melintasi jalur ini untuk membawa barang, menjalin hubungan antarpelabuhan, dan menghubungkan pusat-pusat perdagangan di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, serta wilayah lain. Kutai memiliki posisi penting karena wilayah kesultanannya terhubung dengan Sungai Mahakam, yang menjadi jalur pergerakan manusia dan barang dari pesisir menuju kawasan pedalaman. Sungai tersebut memungkinkan hubungan antara wilayah pesisir dengan permukiman di sepanjang alirannya. Dengan kondisi geografis seperti itu, Kutai tidak berdiri sebagai wilayah yang terpisah dari perdagangan regional, tetapi

menjadi bagian dari jaringan yang telah menghubungkan penguasa lokal dengan pedagang dari berbagai daerah.

Kehadiran VOC di kawasan tersebut berlangsung ketika perdagangan regional telah memiliki pelaku dan hubungan yang terbentuk sebelumnya. Pedagang Makassar, misalnya, telah menjalankan kegiatan perdagangan antarpulau dan memiliki hubungan dengan sejumlah penguasa di Nusantara. Hubungan Kutai dengan Gowa menjadi salah satu bagian dari jaringan tersebut. Bagi VOC, keberadaan pedagang yang telah lebih dahulu menjalin hubungan dengan Kutai menimbulkan persaingan dalam mendapatkan barang dagangan dan akses ke pasar. VOC menghendaki perdagangan yang dapat dikendalikan melalui perjanjian eksklusif atau monopoli. Monopoli berarti hak istimewa untuk menguasai perdagangan barang atau wilayah tertentu sehingga pihak lain tidak bebas melakukan perdagangan yang sama. Apabila penguasa setempat menerima hak monopoli VOC, pedagang pesaing dapat kehilangan kesempatan berdagang atau harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh VOC.

Persaingan inilah yang menjadi latar belakang misi perdagangan VOC ke Kutai pada tahun 1634 M. Menurut Sejarah Kota Samarinda, pada tahun tersebut VOC mengirimkan tiga kapal dagang ke Kutai dan Pasir. Kedatangan kapal-kapal itu merupakan upaya untuk menjalin hubungan langsung dengan penguasa setempat sekaligus membuka peluang perdagangan bagi VOC. Kutai dan Pasir menjadi tujuan karena keduanya memiliki kedudukan dalam jaringan perdagangan di kawasan Kalimantan bagian timur. Misi tahun 1634 M tidak dapat dipandang sebagai kunjungan dagang biasa yang hanya bertujuan membeli barang. VOC juga berusaha mengajak penguasa Kutai dan Pasir membatasi kegiatan pedagang Makassar dan Jawa.(Haidi, 1991) Usaha tersebut memperlihatkan perbedaan kepentingan antara VOC dan penguasa lokal. Bagi VOC, pembatasan pedagang pesaing dapat membuka peluang untuk menguasai perdagangan. Sebaliknya, bagi penguasa Kutai, hubungan dengan berbagai pedagang dapat memberikan pilihan dalam menjual barang, memperoleh kebutuhan dari luar wilayah, dan mempertahankan hubungan dengan kerajaan lain. Dengan kata lain, perdagangan yang terbuka bagi banyak pihak dapat memberikan ruang bagi penguasa setempat untuk menentukan mitra dagangnya sendiri. Persoalannya bukan hanya apakah VOC dapat melakukan transaksi, melainkan apakah penguasa Kutai bersedia menerima ketentuan yang memberi VOC kedudukan istimewa dibandingkan pedagang lain. Keberhasilan memperoleh izin berdagang tidak selalu berarti keberhasilan mendapatkan

monopoli. Dua hal tersebut harus dibedakan: izin berdagang memungkinkan VOC melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan monopoli memberikan hak yang lebih luas untuk membatasi pesaing. Perbedaan ini penting untuk memahami mengapa kedatangan VOC tidak langsung menghasilkan penguasaan atas perdagangan Kutai.

VOC membutuhkan persetujuan penguasa setempat untuk membangun hubungan dagang, sedangkan penguasa Kutai dapat mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tuntutan perusahaan tersebut. Hubungan ini tidak berlangsung antara pihak yang sepenuhnya bebas dari ketergantungan, tetapi juga tidak berarti bahwa VOC langsung memiliki kekuasaan atas Kutai. Selama penguasa setempat masih memiliki hubungan dagang dengan pihak lain dan dapat menentukan sikap terhadap tuntutan VOC, kemampuan perusahaan itu untuk mengendalikan perdagangan tetap terbatas. Oleh sebab itu, misi tahun 1634 M dapat dipahami sebagai tahap awal persaingan untuk mendapatkan akses ekonomi dan pengaruh di Kutai, bukan sebagai bukti bahwa Kutai telah berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

Misi Gerrit Thomassen Pool pada 1635 M: Perdagangan dan Persoalan Hubungan Antarkerajaan

Hubungan Belanda dan Kutai terjadi pertama kali tahun 1635 M. Di tahun yang sama terjadi perjanjian antara Kesultanan Bajarmasin (Kalimantan Selatan) dan VOC pada tanggal 4 September 1935 M di Batavia. Perjanjian tersebut berisi tentnag pembelian lada, bea cukai, dan bantuan VOC terhadap Banjarmasin untuk menaklukan kembali Paser dan Kutai, serta melindungi Banjarmasin dari serangan Mataram.(Ita Syamsiyah Ahyat, 2013) Upaya VOC membangun hubungan dagang dengan Kutai berlanjut pada tahun 1635 M melalui misi yang dipimpin Gerrit Thomassen Pool. Pool tiba di kawasan Kutai pada 7 November 1635 M dan melakukan perundingan dengan penguasa setempat. (Mees, 1935, dikutip dalam Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978) Tahun 1635 M adalah momen krusial di mana Kesultanan Kutai Kartanegara yang dipimpin Sultan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa baru saja memenangkan perang besar mengalahkan Kerajaan Kutai Martapura (Kutai Kuno bercorak Hindu). Di saat yang sama, Kesultanan Banjar di selatan mengklaim Kutai sebagai wilayah vasalnya dan bekerja sama dengan VOC. Menghadapi situasi transisi kekuasaan dan peta geopolitik baru ini, Kutai memilih berunding demi menjaga stabilitas keamanan wilayahnya

Hubungan antara kerajaan-kerajaan di Kalimantan tidak hanya ditentukan oleh perdagangan, tetapi juga oleh hubungan politik. Salah satu bentuk hubungan politik pada masa itu adalah kewajiban membayar upeti. Upeti merupakan pemberian berupa uang, barang, atau hasil tertentu dari suatu penguasa kepada penguasa lain sebagai bagian dari hubungan politik yang mereka jalankan. Namun, kewajiban upeti tidak selalu memiliki arti yang sama dalam setiap hubungan kerajaan. Sejak perjanjian 4 September 1635 M, persoalan perdagangan VOC dikaitkan dengan kewajiban Kutai membayar upeti kepada penguasa Banjarmasin.(Moh. Nur Ars dkk., 1986) Hubungan dagang di Kutai bukan sekadar soal jual-beli barang, tapi juga melibatkan upeti, politik, dan kedaulatan kerajaan. Karena sudah ada aturan kekuasaan yang berlaku sejak dulu, VOC tidak bisa masuk begitu saja hanya dengan berdagang, melainkan harus paham betul peta politik dan struktur kekuasaan penguasa setempat.

Lewat misi tahun 1635 M, VOC mencoba masuk ke politik Kutai lewat jalur perdagangan dengan mengandalkan kapal dan modal mereka. Di sisi lain, Kesultanan Kutai punya wilayah dan kedaulatannya sendiri. Pertemuan keduanya menghasilkan perundingan untuk merundingkan kepentingan yang berbeda, tetapi keuntungan VOC tetap bergantung pada izin Sultan Kutai. Oleh karena itu, jika misi tahun 1634 M menonjolkan usaha membuka perdagangan dan membatasi pesaing, misi tahun 1635 M memperlihatkan bahwa hubungan dagang juga berkaitan dengan persoalan politik antarkerajaan.

Misi Paulus de Beck pada Tahun 1671 M: Upaya Mengulangi Hubungan Dagang

Setelah lebih dari tiga dasawarsa sejak misi Pool, VOC kembali berusaha menjalin hubungan dagang dengan Kutai pada tahun 1671 M. Misi ini dipimpin Paulus de Beck dengan kapal Chialoup de Noorman. Dalam sejumlah kajian sejarah, kunjungan tersebut dikaitkan dengan upaya VOC membangun hubungan perdagangan dengan Kutai dan Berau. (Haidi, 1991) Kunjungan itu juga menunjukkan bahwa kawasan Kalimantan bagian timur masih menjadi wilayah yang ingin dijangkau VOC meskipun upaya sebelumnya belum menghasilkan hubungan dagang yang diharapkan.

Pada abad XVII, VOC berusaha memperkuat kedudukannya dengan mengendalikan perdagangan barang tertentu dan mengurangi persaingan dari pedagang lain. Namun, kebijakan monopoli tidak selalu dapat diterapkan dengan cara yang sama di setiap wilayah. Di daerah yang penguasanya masih memiliki hubungan dengan banyak

mitra dagang, tuntutan monopoli dapat menghadapi hambatan. Penguasa setempat tidak selalu memiliki alasan untuk memberikan hak istimewa kepada satu perusahaan apabila hubungan dengan pedagang lain masih memberikan manfaat ekonomi dan politik.

Misi tahun 1671 M tidak berhasil membangun hubungan perdagangan sebagaimana diharapkan VOC.(Moh. Nur Ars dkk., 1986) Keterangan ini memperlihatkan bahwa pengiriman utusan dan kapal dagang tidak dengan sendirinya menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Akan tetapi, kegagalan membangun hubungan dagang yang diharapkan tidak berarti bahwa VOC sama sekali tidak memperoleh informasi mengenai Kutai. Kunjungan tersebut tetap dapat menjadi sarana untuk mengenali kondisi wilayah, penguasa, dan peluang perdagangan. Meskipun demikian, manfaat informasi semacam itu perlu dibedakan dari keberhasilan memperoleh monopoli atau kendali politik.

Jika dibandingkan dengan misi tahun 1634 M dan tahun1635 M, kunjungan tahun 1671 M memperlihatkan kesinambungan tujuan VOC untuk mendapatkan akses perdagangan di Kutai. Perusahaan tersebut masih berusaha menjalin hubungan dengan penguasa setempat, tetapi belum berhasil memperoleh kedudukan dagang yang sesuai dengan harapannya. Ketiga misi tersebut memperlihatkan bahwa VOC tidak serta-merta mampu mengubah kepentingan dagangnya menjadi kekuasaan atas wilayah yang didatanginya. Kesultanan Kutai tetap penguasa lokal yang berada dalam jaringan hubungan regional, bukan sekadar pihak yang pasif menerima kedatangan bangsa Eropa.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tahun 1634 M, tahun 1635 M, dan tahun 1671 M, hubungan VOC dengan Kesultanan Kutai memperlihatkan adanya perbedaan antara kepentingan yang hendak dicapai VOC dan hasil yang benar-benar diperoleh. VOC ingin membangun hubungan perdagangan yang menguntungkan, membatasi pesaing, dan memperoleh kedudukan istimewa. Namun, keinginan tersebut harus berhadapan dengan jaringan perdagangan yang telah terbentuk, kepentingan penguasa Kutai, serta hubungan politik antarkerajaan di kawasan Kalimantan.

Upaya VOC Memperluas Pengaruh melalui Perdagangan dan Hubungan Antarkerajaan

Kepentingan VOC di Kutai tidak bisa dilepaskan dari persaingan dagang dan politik ada di kawasan Selat Makassar. Jalur ini menghubungkan berbagai pusat perdagangan di Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah Nusantara lainnya. Bagi VOC,

hubungan dengan kerajaan di sepanjang jalur tersebut berpotensi membantu perusahaan memperluas jaringan pelayaran dan memperoleh barang dagangan. Namun, penguasaan perdagangan di satu wilayah tidak otomatis memberikan kendali atas seluruh jalur pelayaran. VOC harus berhadapan dengan pedagang yang telah memiliki jaringan sendiri dan penguasa lokal yang memiliki kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, upaya memperluas pengaruh di Kutai merupakan bagian dari persaingan yang lebih luas untuk mendapatkan akses terhadap perdagangan regional.

Perjanjian Tahun 1635 M: Monopoli Dagang sebagai Jalan Memperluas Pengaruh

Peristiwa pada tahun 1635 M memperlihatkan secara lebih jelas bagaimana kepentingan perdagangan VOC berkaitan dengan hubungan politik antarkerajaan. Dalam kajian mengenai perdagangan rempah di Kalimantan, disebutkan bahwa pada 8 November, tahun 1635, Pieter Pietersz, salah seorang anggota rombongan Gerrit Thomassen Pool, bertemu dengan penguasa Kutai yang disebut sebagai Pangeran Sinum Panji Mendapa Ing Martadipura. Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian yang memuat ketentuan mengenai perdagangan dan hubungan Kutai dengan Banjarmasin. Peristiwa ini penting karena menunjukkan bahwa VOC berusaha membangun hubungan dagang melalui kesepakatan yang juga menyentuh kedudukan politik Kutai.(Ita Syamsiyah Ahyat, 2013)

Terdapat tiga ketentuan penting dalam perjanjian itu. Pertama, Kutai diminta menolak pedagang asing, terutama dari Jawa dan Makassar, serta memberikan hak perdagangan kepada VOC. Kedua, Kutai dinyatakan memiliki hubungan subordinat dengan Kerajaan Banjarmasin. Ketiga, perdagangan bebas di Kutai dibatasi terutama bagi orang Belanda dan Banjar. Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya membahas transaksi jual beli, tetapi juga berusaha mengatur siapa yang boleh berdagang dan bagaimana kedudukan Kutai dalam hubungan dengan kerajaan lain.

Pembatasan pedagang Jawa dan Makassar berpotensi mengurangi persaingan sekaligus membuka jalan bagi penguasaan perdagangan yang lebih besar. Apabila ketentuan itu dapat dilaksanakan, VOC akan memperoleh kedudukan istimewa dibandingkan pedagang lain. Sementara itu, pengaitan Kutai dengan Banjarmasin dapat memengaruhi cara VOC menjalin hubungan dengan penguasa Kutai. Hubungan dengan Banjarmasin menjadi salah satu jalur yang dapat digunakan VOC untuk mengurus

kepentingannya di kawasan tersebut. Dengan demikian, perjanjian dagang berfungsi sebagai sarana untuk memperluas pengaruh ekonomi sekaligus memasuki hubungan politik yang telah ada di Kalimantan. Namun, keberadaan perjanjian tertulis tidak serta-merta membuktikan bahwa semua ketentuannya benar-benar diterapkan. Sebuah kerajaan dapat menyetujui ketentuan tertentu dalam perundingan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada hubungan politik, kepentingan ekonomi, dan kemampuan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus Kutai, kajian perdagangan rempah tersebut menyatakan bahwa tindak lanjut perjanjian tidak sepenuhnya jelas. VOC kemudian lebih banyak mengurus kepentingannya melalui hubungan dengan Banjarmasin. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya mengatur perdagangan Kutai melalui perjanjian belum otomatis menghasilkan kendali yang efektif atas perdagangan setempat.

Perjanjian tahun 1635 M dengan demikian memperlihatkan dua sisi hubungan VOC dan Kutai. Di satu sisi, VOC berusaha mendapatkan hak dagang khusus dan membatasi pesaingnya. Di sisi lain, hubungan dagang itu berhadapan dengan kenyataan bahwa Kutai merupakan kerajaan yang memiliki kepentingan dan hubungan politik sendiri. Karena itu, perjanjian tersebut lebih tepat dipahami sebagai usaha VOC untuk membangun dasar bagi pengaruhnya daripada sebagai bukti bahwa Kutai telah menjadi wilayah jajahan Belanda.

Perdagangan, Gowa, dan Perubahan Jaringan Politik di Selat Makassar

Upaya VOC memperluas pengaruh di Kutai juga berkaitan dengan perubahan hubungan politik di kawasan Selat Makassar setelah Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 M. Perjanjian tersebut mengakhiri perang antara VOC dan Kerajaan Gowa di bawah Sultan Hasanuddin serta memperkuat kedudukan VOC dan sekutunya dalam persaingan perdagangan di Sulawesi Selatan. Namun, perubahan ini tidak serta-merta membuat VOC mampu menguasai seluruh jaringan perdagangan yang menghubungkan Sulawesi dengan Kalimantan. Kutai masih memiliki hubungan dengan pedagang dari berbagai wilayah, sehingga pengaruh VOC di Sulawesi Selatan tidak otomatis berubah menjadi kendali atas perdagangan Kutai.(M. Nur Ichsan Azis, 2013)

Perubahan jaringan perdagangan juga berkaitan dengan kehadiran orang Bugis yang menjadi pengikut Arung Palakka, sekutu VOC. Sejumlah kajian sejarah Samarinda menyebutkan bahwa sejak sekitar tahun 1668 M, kelompok Bugis mulai bermukim di kawasan Kutai, termasuk wilayah yang kemudian dikenal sebagai Samarinda Seberang.

Kehadiran mereka menambah unsur baru dalam hubungan perdagangan di sepanjang Sungai Mahakam dan Selat Makassar. Namun, perlu dibedakan antara kelompok Bugis yang bersekutu dengan VOC dan kelompok Bugis Wajo yang memiliki kepentingan serta pengalaman politik berbeda.(Muhammad Sarip & Nabila Nandini, 2022) Tidak semua orang Bugis dapat dianggap sebagai pendukung VOC.

Pengaruh VOC di Kutai tidak cuman bergantung pada perundingan dengan Sultan, tapi juga dipengaruhi oleh migrasi warga, jaringan pedagang, dan pergeseran aliansi politik di sekitarnya. Persaingan dagang di sini sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak, seperti Makassar (Gowa), Banjarmasin, pedagang Jawa, dan kelompok Bugis. Untuk memperlemah jalur dagang Kutai dan Pasir dengan Gowa serta Jawa, VOC mencoba membuka kembali hubungan lewat kunjungan langsung dan surat-menyurat diplomatik. Namun, komunikasi ini belum membuktikan VOC berhasil menguasai perdagangan Kutai. Kekuasaan VOC baru bisa terbukti jika ada hasil nyata, seperti perdagangan yang berkelanjutan, hak monopoli resmi, atau pos dagang (perwakilan) yang menetap.

Keberlanjutan Upaya VOC di Kutai pada Abad XVIII: Misi Van der Heyden Tahun 1747 M

Memasuki abad XVIII, hubungan VOC dengan Kesultanan Kutai masih menghadapi kesulitan dalam membangun perdagangan yang menguntungkan dan memperoleh kedudukan istimewa di tengah jaringan perdagangan regional. Pada abad XVII, VOC telah beberapa kali mengirimkan misi ke Kutai, antara lain pada tahun 1634 M, 1635 M, dan 1671 M. Berbagai upaya tersebut menunjukkan keinginan VOC untuk membuka hubungan langsung dengan penguasa setempat dan memperluas kepentingan perdagangannya di Kalimantan bagian timur. Namun, kedatangan utusan dan upaya membuat perjanjian tidak serta-merta menghasilkan penguasaan perdagangan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan. Keberhasilan perdagangan tetap bergantung pada persetujuan penguasa lokal, kondisi keamanan, serta hubungan dengan para pedagang yang telah lebih dahulu menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Pada tahun 1747 M, VOC kembali mengirimkan ekspedisi yang dipimpin Van der Heyden untuk menilai peluang perdagangan di Kutai dan Pasir. Misi ini menunjukkan bahwa kedua kerajaan tersebut masih menarik perhatian VOC meskipun berbagai usaha sebelumnya belum menghasilkan hubungan dagang yang diharapkan.(Haidi, 1991)

Ekspedisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan memperoleh barang dagangan, tetapi juga dengan penilaian terhadap keadaan wilayah dan risiko yang mungkin dihadapi apabila VOC menjalankan kegiatan perdagangan secara berkelanjutan. Dalam perdagangan jarak jauh pada masa itu, informasi mengenai keadaan politik, keamanan, jalur pelayaran, dan sikap penguasa setempat menjadi pertimbangan penting sebelum perusahaan memutuskan untuk membangun hubungan dagang yang lebih tetap.

Menurut uraian dalam *Sejarah Kota Samarinda*, laporan Van der Heyden menyebutkan bahwa Kutai dan Pasir memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai mitra perdagangan, tetapi keberadaan orang Eropa di wilayah tersebut dinilai berbahaya.(Moh. Nur Ars dkk., 1986) Salah satu persoalan yang dikaitkan dengan keadaan tersebut adalah keberadaan masyarakat Bugis Wajo yang telah bermukim di kawasan Kalimantan bagian timur. Keterangan ini perlu dibaca dengan memperhatikan sudut pandang laporan VOC, sebab penilaian mengenai keamanan mencerminkan pertimbangan pihak yang hendak menjalankan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut. Hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh masyarakat setempat menolak kehadiran orang Eropa. Namun, laporan tersebut memperlihatkan bahwa VOC memperhitungkan keadaan sosial dan politik setempat dalam menentukan langkah perdagangannya. Keberadaan kelompok pedagang regional yang telah memiliki jaringan dan kepentingan sendiri juga menunjukkan bahwa VOC tidak memasuki ruang perdagangan yang kosong, melainkan wilayah yang telah terhubung dengan berbagai jalur perdagangan antarpulau.

Bagi VOC, kegiatan dagang butuh rasa aman. Modal dan kapal saja tidak cukup; mereka butuh akses pasar, hubungan baik dengan penguasa, dan jaminan keselamatan barang serta awaknya. Jika risikonya terlalu besar dibanding keuntungannya, membuka pos dagang atau rutin mengirim kapal justru bikin rugi. Laporan Van der Heyden menegaskan bahwa Kutai dan Pasir memang punya potensi ekonomi yang bagus, tapi potensi itu tidak bisa dimanfaatkan jika situasi di lapangan tidak aman dan tidak mendukung untuk jangka panjang.

Dalam perdagangan di Kutai pada abad XVIII, penguasa setempat dan para pedagang regional masih memiliki peran penting. VOC memang memiliki kapal, modal, dan jaringan perdagangan yang luas. Namun, hal itu tidak membuat VOC dapat mengatur perdagangan di semua wilayah yang didatanginya. Untuk menjalankan perdagangan di Kutai, VOC tetap harus berhubungan dengan penguasa setempat dan menghadapi para

pedagang yang telah lebih dahulu menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan VOC tidak hanya bergantung pada barang dan modal yang dibawanya, tetapi juga pada kemampuannya menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perdagangan di Kutai tidak sepenuhnya berada di bawah kendali perusahaan Eropa.

Menurut keterangan dalam buku Sejarah Kota Samarinda, setelah misi Van der Heyden pada tahun 1747 M, VOC tidak lagi mengirimkan kapal dagangnya ke Kutai dan Pasir. Buku tersebut juga menjelaskan bahwa VOC tidak berhasil membangun hubungan perdagangan yang menguntungkan secara berkelanjutan di kedua wilayah tersebut. Keterangan ini menunjukkan bahwa usaha VOC untuk mengembangkan perdagangan di Kalimantan bagian timur tidak berjalan sesuai harapan.(Moh. Nur Ars dkk., 1986) Misi Van der Heyden pada tahun 1747 M menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. Melalui misi ini, VOC masih berusaha menilai peluang perdagangan di Kutai dan Pasir, tetapi kegiatan dagangnya tidak berlanjut sebagaimana yang diharapkan perusahaan.

Berhentinya pengiriman kapal dagang VOC ke Kutai dan Pasir tidak berarti seluruh kegiatan perdagangan di kedua wilayah tersebut ikut berhenti. Perdagangan tetap berlangsung melalui hubungan antara Kutai dan wilayah lain di Nusantara, termasuk Sulawesi. Para pedagang regional masih berperan dalam membawa barang dan menghubungkan berbagai wilayah perdagangan. Kejadian ini menunjukkan VOC tidak berhasil melanjutkan perdagangan yang menguntungkan bagi perusahaannya di wilayah itu. Jika ditelusuri sejak abad XVII hingga abad XVIII, upaya VOC di Kutai dilakukan melalui beberapa cara. VOC berusaha menjalin hubungan dengan penguasa setempat, memperoleh hak perdagangan, dan membangun kedudukan yang menguntungkan bagi perusahaannya. Upaya tersebut terlihat dalam misi pada tahun 1634 M, 1635 M, dan 1671 M, kemudian berlanjut dengan ekspedisi Van der Heyden pada 1747 M. Namun, perjanjian dan hubungan dagang tidak serta-merta membuat VOC mampu menguasai perdagangan di Kutai. Perusahaan tersebut tetap harus menghadapi kepentingan penguasa setempat, persaingan dengan pedagang regional, serta keadaan keamanan dan politik di wilayah yang ditujunya.

Dengan demikian, hubungan VOC dengan Kesultanan Kutai pada abad XVII–XVIII merupakan rangkaian upaya untuk membangun hubungan dagang dan memperoleh keuntungan. Misi pada tahun 1634 M, 1635 M, dan 1671 M memperlihatkan usaha VOC

untuk membuka hubungan perdagangan dan mendapatkan kedudukan yang menguntungkan. Sementara itu, ekspedisi Van der Heyden pada tahun 1747 M menunjukkan bahwa VOC masih menaruh perhatian terhadap peluang perdagangan di Kutai dan Pasir. Akan tetapi, upaya tersebut tidak menghasilkan kegiatan perdagangan yang berkelanjutan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa VOC tidak dapat mencapai seluruh kepentingannya hanya dengan mengandalkan kapal dan modal. Penguasa Kesultanan Kutai serta jaringan pedagang regional tetap memiliki peran dalam menentukan perkembangan perdagangan di Kalimantan bagian timur.

KESIMPULAN

Misi perdagangan VOC ke Kutai pada tahun 1634 M, 1635 M, dan 1671 M menunjukkan bahwa Kalimantan bagian timur mulai menjadi perhatian VOC dalam upaya memperluas jaringan perdagangan di Nusantara. Kedatangan VOC tidak hanya bertujuan memperoleh komoditas dagang, tetapi juga mengenali penguasa lokal dan jalur perdagangan yang telah berkembang. Namun, keberadaan pedagang dari Makassar dan Jawa menunjukkan bahwa VOC harus bersaing dengan jaringan perdagangan yang sudah lebih dahulu terjalin.

Upaya VOC memperluas pengaruh melalui perdagangan dan hubungan antarkerajaan memperlihatkan bahwa kepentingan ekonomi berkaitan erat dengan kepentingan politik. Kesepakatan dagang yang dikaitkan dengan misi 1635 M menjadi salah satu cara VOC berusaha membatasi persaingan dan memperoleh keistimewaan perdagangan. Meskipun demikian, keberadaan kesepakatan tersebut tidak serta-merta membuktikan keberhasilan monopoli VOC, karena pelaksanaannya bergantung pada kondisi politik dan perdagangan di wilayah Kutai.

Misi Van der Heyden pada tahun 1747 M memperlihatkan keberlanjutan perhatian VOC terhadap potensi perdagangan di Kutai dan Pasir pada abad XVIII. Namun, berbagai hambatan dan keterbatasan hubungan dagang menunjukkan bahwa VOC belum berhasil membangun pengaruh perdagangan yang kuat dan berkelanjutan di Kutai. Secara keseluruhan, hubungan VOC dan Kesultanan Kutai pada abad XVII–XVIII merupakan proses persaingan dan negosiasi kepentingan, ketika VOC berusaha memperluas pengaruhnya, sementara penguasa lokal tetap memiliki peran dalam menentukan arah hubungan dengan pihak luar.

DAFTAR PUSTAKA

Haidi. (1991). *Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimantan Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ita Syamsiyah Ahyat. (2013). *Kesultanan Kutai 1825-1910: Perubahan Politik dan Ekonomi Akibat Penetrasi Kekuasaan Belanda*. Penerbit Serat Alam Media.

J. Eisenberger. (1936). *Kroniek der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo*. Liem Hwat Sing.

Juniar Purba, & Yusri Darmadi. (2022). *Perniagaan Rempah di Perairan Timur dan Timur Laut Kalimantan Abad XVI dan XVII*. Balai Pelestarian Nilai Budaya.

M. Nur Ichsan Azis. (2013). Ekonomi Maritim Kesultanan Makasar Abad XVII M. *Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, *4*(2), 176–201.

Moh. Nur Ars, Yunus Rasyid, & Hasyim Achmad. (1986). *SEJARAH KOTA SAMARINDA* . Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Muhammad Sarip, & Nabila Nandini. (2022). Kontroversi Sejarah La Mohang Daeng Mangkona dan Hari Jadi Kota Samarinda: Sebuah Tinjauan Kritis. *Yupa: Historical Studies Journal*, *5*(2), 61–77.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (1978). *Sejarah Daerah Kalimantan Timur* . Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Sartono Kartodirdjo. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.

Sem Touwe, & Jems Sopacua. (2023). Jejak VOC dan Pembentukan Administratif Pemerintahan Hindia Belanda di Pontianak Kalimantan Barat. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *8*, 1552–1561.